

Strategi Penguatan Literasi Politik dan Mitigasi Politik Uang: Edukasi Pemilih Cerdas bagi Masyarakat Kampung Angkrong, Desa Cibodas, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi

Nenda Suhandi¹, Agri Hamdani Apriana², Argi Ramadhan Mubarak³, Ateng Hamdani⁴, Citra Dwiyantri Ridwan⁵, Yuli Susanti⁶, Slamet Sutrisno⁷, Hesri Mintawati⁸

¹⁻⁸ Magister Manajemen, Universitas Nusa Putra

*Corresponding author

E-mail: argiramadhan@gmail.com*

Article History:

Received: May, 2026

Revised: May, 2026

Accepted: May, 2026

Abstract: Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat di Kampung Angkrong, Desa Cibodas, Kec. Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, menjelang periode pemilihan umum. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya literasi informasi terkait kandidat, kompleksitas teknis pemungutan suara, serta kerentanan terhadap praktik politik uang. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi partisipatif dan edukasi literasi media. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya verifikasi informasi untuk menangkal hoaks serta kesadaran akan dampak negatif politik uang terhadap integritas demokrasi lokal. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya pendampingan berkelanjutan untuk menjaga netralitas dan kemandirian politik masyarakat pedesaan.

Keywords:

Pemilihan Umum, Pemilih Cerdas, Literasi Politik, Politik Uang, Partisipasi Masyarakat.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam perwujudan kedaulatan rakyat yang menuntut partisipasi aktif secara substansial, bukan sekadar kehadiran administratif. Namun, realitas di tingkat lokal sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme demokrasi dengan pemahaman masyarakat di lapangan. Di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Sukabumi, antusiasme masyarakat sering kali tidak dibarengi dengan literasi politik yang memadai. Hal ini menciptakan celah di mana partisipasi kuantitas yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas pilihan yang berbasis pada evaluasi rasional terhadap visi dan misi kandidat.

Fenomena ini diperparah oleh derasnya arus informasi digital yang tidak terfilter. Menurut laporan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024), persebaran disinformasi dan hoaks terkait isu politik meningkat signifikan menjelang pemilu, di mana platform media sosial menjadi saluran utama yang mendistorsi persepsi publik mengenai kredibilitas calon pemimpin. Kondisi tersebut selaras dengan temuan penelitian Lestari et al. (2022) yang menyebutkan bahwa pemilih di daerah penyangga perkotaan sering kali terjebak dalam pusaran informasi yang bias (*echo chamber*). Kurangnya kemampuan verifikasi data membuat masyarakat sulit membedakan antara kampanye hitam dengan kritik yang membangun secara objektif.

Di Kampung Angkrong, Desa Cibodas, tantangan serupa muncul secara nyata. Meskipun akses internet sudah merambah ke pelosok desa, pemanfaatannya untuk mencari profil kepemimpinan yang kredibel masih sangat minim. Masyarakat cenderung mengandalkan sumber informasi informal yang validitasnya sulit dipertanggungjawabkan secara manajemen informasi. Selain itu, terdapat kesenjangan pendidikan politik antara generasi tua dan muda. Pemilih muda yang seharusnya menjadi agen perubahan sering kali mengalami apati. Suryono (2021) dalam penelitiannya mengenai dinamika politik pedesaan menekankan bahwa tanpa intervensi pendidikan politik yang sistematis, kelompok pemilih muda cenderung kehilangan orientasi dalam menentukan pilihan yang berdampak pada kebijakan publik.

Pendidikan pemilih memiliki posisi penting dalam memperkuat kualitas demokrasi karena tidak hanya berkaitan dengan peningkatan partisipasi, tetapi juga dengan pembentukan kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan warga dalam menggunakan hak politiknya secara rasional. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan pemilih diperlukan untuk membantu penyelenggaraan pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kualitas partisipasi, serta memperkuat sistem demokrasi melalui pemahaman atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam proses politik (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015). Dengan demikian, kegiatan edukasi pemilih di Kampung Angkrong, Desa Cibodas, tidak hanya dipahami sebagai kegiatan sosialisasi teknis, tetapi juga sebagai proses membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengambil keputusan politik secara mandiri dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, pendidikan pemilih juga relevan dengan upaya mengikis pragmatisme politik, terutama praktik politik uang. KPU menegaskan bahwa salah satu tujuan pendidikan pemilih adalah meningkatkan kerelawanan pemilih, yaitu

partisipasi politik yang lahir dari kesadaran dan idealisme, bukan karena insentif material. Sebaliknya, pragmatisme pemilih muncul ketika partisipasi politik diperjualbelikan melalui imbalan tertentu, sehingga dapat merusak fondasi demokrasi, memutus relasi akuntabilitas antara pemilih dan pejabat publik, serta membuka ruang bagi berkembangnya korupsi (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015). Oleh karena itu, edukasi mengenai bahaya politik uang menjadi bagian penting dalam membentuk pemilih yang tidak hanya hadir di TPS, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menjaga kualitas demokrasi lokal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah pemilihan umum sangat bergantung pada tingkat literasi politik pemilihnya. Tanpa adanya edukasi yang terstruktur, pemilih hanya akan menjadi objek mobilisasi kepentingan politik jangka pendek, yang pada akhirnya menghambat efektivitas manajemen pembangunan daerah. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya program pengabdian masyarakat ini. Diperlukan sebuah intervensi edukatif yang mampu menjembatani keterbatasan informasi masyarakat dengan standar pengetahuan politik yang dibutuhkan untuk menjadi pemilih yang cerdas dan mandiri di Desa Cibodas.

Masalah mendasar yang ditemukan di lapangan adalah rendahnya ketahanan masyarakat terhadap pengaruh eksternal yang merusak integritas pemilihan. Praktik politik uang masih menjadi ancaman laten di tingkat desa, di mana pemberian materi sering kali dianggap sebagai bentuk bantuan sosial daripada sebagai pelanggaran etika politik. Secara formal, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI, 2024) menegaskan bahwa politik uang adalah distorsi demokrasi yang menurunkan martabat pemilih dan merusak kualitas kepemimpinan. Namun, tekanan ekonomi serta rendahnya pemahaman hukum di akar rumput membuat praktik ini tetap eksis dan sulit diberantas tanpa edukasi yang masif.

Studi yang sebelumnya dilakukan oleh Pratama & Wijaya (2023) mengungkapkan bahwa politik uang tidak hanya merusak sistem politik, tetapi juga menciptakan biaya politik yang tinggi (*high-cost politics*). Secara manajerial, hal ini memicu perilaku koruptif di masa depan karena pemimpin terpilih cenderung berusaha memulihkan modal yang telah dikeluarkan selama masa kampanye.

Selain masalah integritas, kompleksitas teknis dalam prosedur pemungutan suara juga menjadi kendala serius. Banyak warga yang masih merasa bingung dengan banyaknya jenis surat suara dan mekanisme administratif di TPS. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah suara tidak sah yang merugikan hak konstitusional warga.

Kurangnya pemahaman teknis ini, jika digabungkan dengan minimnya akses informasi kredibel, menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Ramadhan (2020) dalam analisisnya mengenai manajemen krisis informasi menyebutkan bahwa ketidaktahuan teknis masyarakat sering kali menjadi pintu masuk bagi manipulasi suara yang merusak keadilan dalam pemilu.

Program Pengabdian Masyarakat ini dirancang untuk memberikan solusi konkret terhadap berbagai kendala yang menghambat terciptanya pemilih cerdas di Kampung Angkrong. Melalui pendekatan partisipatif, tim bertujuan untuk membekali warga dengan keterampilan kritis dalam memproses informasi serta memperkuat integritas moral dalam menghadapi tekanan politik uang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pola pikir baru di mana masyarakat tidak lagi melihat pemilu sebagai ritual lima tahunan semata, melainkan sebagai momentum strategis untuk menentukan arah pembangunan Desa Cibodas. Fokus utama diberikan pada peningkatan kemampuan analisis rekam jejak calon serta pemahaman mengenai konsekuensi jangka panjang dari setiap suara yang diberikan.

Secara spesifik, tujuan dari kegiatan PPM ini adalah:

- 1) Meningkatkan literasi politik masyarakat melalui edukasi cara memverifikasi informasi dan menangkal hoaks sesuai standar literasi media.
- 2) Memberikan pemahaman teknis mengenai prosedur pemungutan suara guna meminimalisir kesalahan administratif di TPS.
- 3) Menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk politik uang dan menjaga netralitas demi menjaga marwah demokrasi lokal di Kabupaten Sukabumi.

Metode

A. Waktu, Lokasi, dan Sasaran Peserta

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026, mengambil momentum strategis di tengah dinamika persiapan pesta demokrasi nasional yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 nanti. Pemilihan waktu ini dilakukan secara sengaja agar materi edukasi yang disampaikan tetap relevan dengan situasi sosial-politik yang sedang berkembang, sehingga masyarakat memiliki dorongan motivasi yang kuat untuk menginternalisasi nilai-nilai pemilih cerdas dalam kehidupan sehari-hari.

Lokasi kegiatan dipusatkan di Kampung Angkrong, Desa Cibodas, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kegiatan PPM dan Kunjungan Akademik ke BRMP TRI Parungkuda, dan menyesuaikan dengan karakteristik wilayah yang memiliki populasi pemilih yang cukup padat namun masih menghadapi tantangan akses informasi yang asimetris. Struktur geografis dan sosiologis Desa Cibodas yang kental dengan nilai-nilai kemasyarakatan menjadi latar belakang yang ideal untuk menguji efektivitas komunikasi politik di tingkat akar rumput.

Sasaran utama dari program ini adalah masyarakat Kampung Angkrong, dengan fokus khusus pada keterwakilan berbagai elemen warga, mulai dari tokoh masyarakat, kelompok perempuan, hingga pemilih muda (generasi Z dan Milenial). Pelibatan audiens yang beragam ini bertujuan untuk menciptakan efek bola salju (*snowball effect*), di mana pemahaman mengenai pentingnya menjadi pemilih cerdas dapat disebarluaskan kembali melalui jalur komunikasi informal antarwarga di lingkungan Desa Cibodas.



Gambar 1. Foto bersama tim pelaksana PPM, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Nusa Putra, perangkat desa, dan masyarakat Kampung Angkrong, Desa Cibodas

B. Tahapan Pelaksanaan

Tahap awal dimulai dengan melakukan observasi lapangan dan analisis situasi untuk memetakan urgensi masalah yang dihadapi oleh warga Kp. Angkrong. Dalam fase ini, tim melakukan koordinasi intensif dengan perangkat desa dan tokoh pemuda

setempat guna memastikan bahwa pendekatan edukasi yang akan digunakan selaras dengan norma dan budaya lokal. Identifikasi dilakukan untuk melihat sejauh mana paparan hoaks dan praktik politik uang telah mempengaruhi persepsi kolektif masyarakat terhadap proses pemilihan umum.

Selain koordinasi kewilayahan, persiapan juga mencakup penyusunan modul materi yang inklusif dan mudah dipahami oleh berbagai tingkat pendidikan. Tim menyusun alat peraga visual dan draf simulasi yang dirancang untuk menyederhanakan kompleksitas teknis pemungutan suara. Persiapan logistik dan teknis diselesaikan secara detail guna memastikan bahwa pada hari pelaksanaan, alur kegiatan dapat berjalan secara profesional tanpa mengesampingkan kehangatan interaksi khas masyarakat perdesaan.

Pada hari pelaksanaan, kegiatan dimulai dengan penyampaian materi inti mengenai strategi menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. Narasi edukasi difokuskan pada tiga pilar utama: literasi informasi untuk menangkal disinformasi, pemahaman hak konstitusional, dan bahaya politik uang terhadap kualitas pembangunan daerah. Penyampaian materi dilakukan dengan gaya komunikasi dua arah yang santai namun tetap berbobot, sehingga tidak menciptakan jarak antara akademisi dan masyarakat.

Sesi edukasi kemudian dilanjutkan dengan simulasi teknis mengenai tata cara pemungutan suara untuk memberikan gambaran nyata kepada warga. Tim mendemonstrasikan cara mengenali keabsahan surat suara serta prosedur yang benar di dalam bilik suara guna meminimalisir kesalahan administratif. Penggunaan alat peraga simulasi ini terbukti efektif dalam memecah kebuntuan informasi terkait rumitnya sistem pemilihan, sekaligus membangkitkan rasa percaya diri warga untuk berpartisipasi aktif pada hari pemilihan nanti.

Memasuki tahap diskusi, warga diajak untuk berbagi pengalaman dan keresahan mereka mengenai isu politik uang yang sering kali menjadi dilema di tengah keterbatasan ekonomi. Dalam sesi ini, tim berperan sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis mengenai *trade-off* antara keuntungan materi jangka pendek dengan kerugian layanan publik jangka panjang. Diskusi berlangsung secara terbuka dan emosional, di mana warga mulai menyadari bahwa kedaulatan suara mereka adalah investasi yang terlalu berharga untuk ditukarkan dengan materi.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada prinsip pendidikan pemilih yang kontekstual, partisipatif, dan berkesinambungan. Pendidikan pemilih yang

kontekstual berarti materi dan metode harus disesuaikan dengan kondisi aktual serta karakter sosial masyarakat setempat. Sementara itu, prinsip partisipatif menekankan bahwa pendidikan pemilih perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, hingga komunitas lokal. KPU juga menekankan bahwa pendidikan pemilih bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan kepentingan bersama dalam negara demokrasi (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015). Atas dasar tersebut, kegiatan PPM ini dirancang dengan pendekatan dialogis melalui penyampaian materi, diskusi warga, dan simulasi sederhana agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif mengaitkan materi dengan pengalaman sosial-politik yang mereka hadapi sehari-hari.

Selain itu, prinsip berkesinambungan juga menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pendidikan pemilih tidak seharusnya hanya dilakukan menjelang pemilihan, tetapi juga perlu dilaksanakan di luar masa pemilihan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk membangun sikap dan perilaku politik yang lebih matang. KPU menegaskan bahwa pendidikan pemilih yang terputus-putus tidak akan efektif karena perubahan sikap politik memerlukan proses lanjutan dan penguatan secara berulang (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015). Oleh sebab itu, kegiatan di Kampung Angkrong diposisikan sebagai langkah awal untuk membangun kesadaran politik masyarakat desa, sekaligus membuka peluang pendampingan lanjutan dalam bentuk sosialisasi, diskusi warga, dan penguatan literasi digital politik.

Sebagai penutup, sesi diskusi dialihkan pada penguatan literasi media digital, di mana warga diajak mempraktikkan cara sederhana memverifikasi kebenaran sebuah informasi politik melalui gawai mereka. Diskusi interaktif ini berhasil membangun komitmen bersama di antara warga Kampung Angkrong untuk menciptakan lingkungan pemilihan yang bersih dan damai. Seluruh aspirasi dan masukan dari warga dicatat secara sistematis sebagai bahan evaluasi dan data pendukung bagi draf laporan publikasi jurnal pengabdian ini.



Gambar 2. Penyampaian materi pendidikan pemilih kepada masyarakat Kampung Angkrong, Desa Cibodas

Hasil

Berdasarkan tinjauan dari masyarakat Desa Cibodas, Kecamatan Bojong Genteng terhadap sistem elektoral di Indonesia, ditemukan bahwa kedaulatan pemilih merupakan proses berjenjang yang memuncak pada konversi suara menjadi representasi politik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Hasil kajian menunjukkan adanya lima tingkatan kedaulatan rakyat dalam pemilu, di mana tingkat kelima yaitu pemilih yang suaranya sah dan diberikan kepada partai yang memenuhi ambang batas parlemen menjadi penentu utama efektivitas suara tersebut. Data lapangan mengindikasikan bahwa tanpa prosedur yang adil dan transparan, suara yang diberikan warga negara berisiko kehilangan maknanya dalam menentukan arah kebijakan publik.

Hasil tinjauan dengan perangkat Desa Cibodas yang ikut serta juga mengidentifikasi adanya hambatan sistemik yang signifikan dalam pelaksanaan kedaulatan tersebut, terutama terkait kompleksitas teknis pemilu. Ditemukan bahwa besarnya jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) dan banyaknya calon legislatif yang harus dipilih dalam satu waktu sering kali membingungkan pemilih, baik dari kalangan terpelajar maupun buta huruf. Selain itu, ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

akibat transisi sistem administrasi kependudukan yang belum sempurna masih menjadi temuan berulang yang menghambat akses warga dalam menyalurkan hak politiknya secara penuh.

Mengenai aspek keterlibatan publik, khususnya di Desa Cibodas ini ditemukan bahwa partisipasi warga masyarakat dalam pemilu di Indonesia telah berkembang melampaui sekadar pemberian suara di tempat pemungutan suara (TPS). Partisipasi tersebut kini mencakup keterlibatan aktif dalam pendidikan pemilih, sosialisasi mandiri, hingga pemantauan independen terhadap jalannya proses elektoral. Aktivitas ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran kolektif di tingkat akar rumput untuk menjaga integritas pemilu dari potensi kecurangan dan manipulasi hasil.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai kehadiran di TPS saja. Dalam kajian Kemitraan, partisipasi warga dalam proses penyelenggaraan pemilu mencakup berbagai bentuk, antara lain melaksanakan sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, memberikan suara, menyampaikan hasil pemantauan, melaporkan dugaan pelanggaran, melakukan survei, serta menyebarluaskan hasil penghitungan cepat. Bentuk-bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa warga memiliki ruang yang luas untuk ikut menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu (Surbakti & Supriyanto, 2013). Temuan tersebut selaras dengan kegiatan PPM di Desa Cibodas, di mana masyarakat tidak hanya mengikuti penyampaian materi, tetapi juga terlibat dalam diskusi mengenai pengalaman politik uang, kerumitan teknis pemilu, dan pentingnya memilih berdasarkan informasi yang benar.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini juga memiliki relevansi dengan penguatan integritas pemilu. Kemitraan menjelaskan bahwa partisipasi warga penting untuk meningkatkan minat dan kepedulian terhadap pemilu, memperluas pengetahuan masyarakat mengenai proses pemilu, serta menjamin pemilu yang lebih adil melalui pemantauan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran (Surbakti & Supriyanto, 2013). Dalam kegiatan PPM ini, masyarakat Kampung Angkrong diarahkan untuk memahami bahwa suara mereka bukan sekadar pilihan individual, tetapi bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap proses demokrasi. Dengan demikian, edukasi pemilih tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong warga untuk berani menolak praktik manipulatif, termasuk politik uang dan penyebaran informasi politik yang tidak terverifikasi.

Selain itu, hasil pemetaan menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat

di Desa Cibodas juga termanifestasi melalui penggunaan metode ilmiah, seperti survei dan perhitungan cepat (*quick count*). Lembaga-lembaga masyarakat dan akademisi berperan sebagai instrumen transparansi yang memberikan informasi awal mengenai hasil pemilu kepada publik. Keterlibatan ini terbukti mampu meminimalkan ketegangan sosial dengan menyediakan data pembandingan yang valid terhadap hasil resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu.

Diskusi dan Analisis

Dalam sesi diskusi bersama masyarakat dan perangkat Desa Cibodas mengenai kedaulatan, terlihat adanya paradoks antara prinsip kedaulatan rakyat dengan desain teknis yang diterapkan dalam pemilu Indonesia. Meskipun secara konstitusional rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sistem yang dianggap sebagai salah satu yang paling rumit di dunia ini justru sering kali menyandera kedaulatan tersebut dalam labirin birokrasi dan prosedur yang membingungkan. Hal ini menuntut adanya penyederhanaan sistem elektoral agar pemilih tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi dapat memilih dengan kesadaran penuh berdasarkan informasi yang jelas mengenai para calon wakilnya.

Lebih lanjut lagi, saat diskusi mengenai tata kelola internal partai politik mengungkapkan bahwa lemahnya kedaulatan pemilih juga berakar pada struktur partai yang sentralistik. Ketika keputusan mengenai calon anggota legislatif didominasi oleh elit pusat tanpa melibatkan anggota di tingkat lokal, maka hubungan antara pemilih dan wakil rakyat menjadi terputus. Transformasi menuju partai politik yang lebih demokratis dan transparan merupakan syarat mutlak agar kedaulatan yang diberikan rakyat di bilik suara dapat bertransformasi menjadi akuntabilitas publik yang nyata di lembaga perwakilan.

Dari perspektif warga Cibodas dan perangkat Desa Cibodas sebagai partisipan dalam kegiatan ini, luasnya spektrum keterlibatan warga menandakan bahwa legitimasi pemilu tidak hanya bergantung pada kinerja penyelenggara, tetapi juga pada pengawasan kolektif masyarakat. Partisipasi aktif dalam pengawasan dan pemantauan berfungsi sebagai mekanisme cek dan ricek yang vital dalam demokrasi. Diskusi ini menekankan bahwa semakin besar ruang yang diberikan bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan pemilu, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik terhadap hasil dan proses demokrasi yang berlangsung.

Pembahasan mengenai kedaulatan pemilih juga memperlihatkan bahwa hak suara warga perlu dilindungi sejak tahap pendataan, pemungutan suara, hingga

konversi suara menjadi kursi politik. Surbakti, Supriyanto, dan Asy'ari (2011) menjelaskan bahwa pemilu merupakan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Namun, kedaulatan pemilih dapat melemah ketika pemilih tidak terdaftar dengan baik, tidak memahami tata cara pemberian suara, atau suaranya tidak sah karena kerumitan teknis pemilu. Oleh karena itu, kegiatan edukasi di Desa Cibodas menjadi penting karena membantu masyarakat memahami bahwa hak pilih harus digunakan secara sadar, benar, dan terlindungi agar tidak kehilangan makna dalam proses demokrasi.

Lebih lanjut, perlindungan kedaulatan pemilih juga berkaitan dengan kemampuan pemilih untuk memberikan suara secara tepat dan memahami prosedur pemungutan suara. Kemitraan menegaskan bahwa kedaulatan pemilih dapat dijamin apabila desain surat suara dan cara pemberian suara memudahkan pemilih menyatakan pilihannya, sehingga jumlah suara tidak sah dapat ditekan. Selain itu, proses penghitungan suara di TPS harus berlangsung transparan, akurat, dan bebas dari manipulasi (Surbakti et al., 2011). Berdasarkan hal tersebut, simulasi teknis dalam kegiatan PPM menjadi bagian penting karena membantu peserta memahami cara menggunakan hak pilih secara benar, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa suara pemilih harus dijaga dari kesalahan administratif maupun praktik manipulatif.

Sebagai solusi strategis dari hasil temuan dan diskusi bersama Masyarakat dan perangkat Desa Cibodas, sudah seharusnya diperlukan desain ulang sistem pemilu yang lebih memihak pada kepentingan pemilih, seperti pengecilan besaran Dapil dan pemisahan jadwal pemilu nasional dengan lokal. Pemisahan ini akan memberikan fokus yang lebih tajam bagi pemilih dalam mengevaluasi isu-isu spesifik di setiap tingkatan pemerintahan, sehingga partisipasi yang dilakukan bukan sekadar partisipasi mobilisasi, melainkan partisipasi kualitatif yang didorong oleh pemahaman terhadap visi-misi kandidat. Dengan demikian, perlindungan kedaulatan dan peningkatan partisipasi harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih sehat dan substansial.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Desa Cibodas ini berhasil menegaskan kembali bahwa kedaulatan rakyat bukan sekadar konsep abstrak, melainkan praktik nyata yang harus dijaga melalui edukasi politik yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, warga desa diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran mereka dalam proses konversi suara agar hak pilih yang mereka

gunakan tidak terbuang sia-sia akibat kerumitan teknis sistem pemilu. Kesimpulan utama dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kedaulatan di tingkat desa merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa suara masyarakat pedesaan tetap memiliki bobot yang signifikan dalam menentukan arah kepemimpinan di tingkat nasional maupun lokal.

Peran serta masyarakat Desa Cibodas dalam kegiatan ini sangat progresif dan tidak hanya terbatas sebagai audiens pasif. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam dialog mengenai pemantauan dan pengawasan proses pemungutan suara di lingkungan mereka sendiri, yang merupakan manifestasi nyata dari partisipasi warga dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, keterlibatan warga dalam sesi simulasi pendidikan pemilih menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk meningkatkan literasi politik di tingkat akar rumput, sehingga mereka mampu menjadi agen sosialisasi mandiri bagi keluarga dan tetangga di sekitarnya.

Secara keseluruhan, sinergi antara tim PPM dan warga Desa Cibodas menciptakan mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat melalui bentuk partisipasi pengawasan dan pemantauan independen. Dengan adanya keterlibatan aktif ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek mobilisasi suara, melainkan subjek berdaulat yang kritis terhadap jalannya tahapan pemilu. Keberhasilan kegiatan ini merekomendasikan perlunya pendampingan serupa secara periodik guna memastikan kedaulatan pemilih di Desa Cibodas tetap terlindungi dari potensi manipulasi dan praktik-praktik yang merugikan hak-hak politik warga negara.

Pengakuan/Acknowledgment

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada:

- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusa Putra Sukabumi yang telah memberikan dukungan administratif, fasilitas, serta bimbingan dalam pelaksanaan pengabdian ini.
- 2) BRMP TRI Parungkuda, yang telah membantu kami dalam memfasilitasi tempat sehingga kami dapat kegiatan PPM ini dapat terlaksana dengan baik.
- 3) Pemerintah Desa Cibodas, khususnya kepada Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa, atas izin, kerja sama, dan bantuan teknis yang luar biasa selama tim berada di lapangan.

- 4) Masyarakat Desa Cibodas yang telah berpartisipasi aktif dengan antusiasme tinggi dalam setiap sesi dialog, sosialisasi, dan pendidikan pemilih. Peran serta warga sangat berarti dalam mewujudkan semangat kedaulatan rakyat di tingkat akar rumput.
- 5) Rekan-rekan Tim PPM, yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dalam melakukan observasi, pendampingan, hingga pengolahan data sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 6) Seluruh informan dan tokoh masyarakat yang telah memberikan wawasan serta perspektif berharga mengenai dinamika elektoral dan partisipasi warga di wilayah Desa Cibodas.

Semoga hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan literasi politik dan penguatan demokrasi, khususnya dalam menjaga kedaulatan pemilih di masa depan.

Daftar Referensi

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Panduan Pengawasan Partisipatif dan Mitigasi Politik Uang*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Hidayat, A. (2023). *Peran Akademisi dalam Mewujudkan Demokrasi Substansial melalui Pendidikan Politik*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 145-158.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). *Laporan Tren Isu Hoaks dan Disinformasi Sektor Politik*. Jakarta: Kominfo.
- Lestari, P., dkk. (2022). *Literasi Digital Pemilih Muda dalam Menghadapi Echo Chamber di Media Sosial*. *Journal of Political Communication*, 5(1), 22-35.
- Pratama, R., & Wijaya, S. (2023). *The Impact of Money Politics on Local Governance Integrity*. *International Journal of Social Science*, 12(4), 310-325.
- Ramadhan, F. (2020). *Manajemen Krisis Informasi dan Edukasi Pemilih dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(3), 88-102.
- Suryono, B. (2021). *Dinamika Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Riset Politik*, 15(2), 201-215.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2015). *Pedoman pendidikan pemilih*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). *Partisipasi warga masyarakat dalam proses*

penyelenggaraan pemilihan umum. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Menjaga kedaulatan pilih*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.